

MEMBANGUN LITERASI DEMOKRASI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PENDEKATAN *CASE METHOD*

Wahyudin Fitriyana^{1*}, M. Januar Ibnu Adham²

¹Universitas Singaperbangsa, Karawang

²Universitas Singaperbangsa, Karawang

* wahyudin.fitriyana@staff.unsika.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 12, 2022

Accepted: February 22, 2023

Published: March 15, 2023

Keywords:

Build; Case Method; Democratic
Literacy

ABSTRACT

The purpose of this research is to build students' democratic literacy in higher education through the case method approach. This learning method is carried out by giving assignments to analyze cases that are developing at this time by contextualizing the material being discussed. The research method used in this writing is the expost facto method. Techniques in data collection in this study used tests, observations and questionnaires with the help of google form. The population participants of this study were FKIP students in one of the Karawang universities, with a sample of Social Science Education study program students. The results showed that learning using the case method approach is one of the learning models that can stimulate students in building democratic literacy, because there are demands faced by students as citizens. The first challenge is that students enter the work environment, this guidance not only encourages students to have skills in accordance with their knowledge but also requires students to be equipped with good graduate morals and ethics and the ability to work with others, secondly building citizens in this context is a critical and responsible student and participating in developing political literacy.

Corresponding Author:

Wahyudin Fitriyana

wahyudin.fitriyana@staff.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

Pada dekade terakhir pendidikan tinggi menunjukkan peran dalam mendidik kewarganegaraan yang demokratis terutama di Amerika Serikat dan Inggris serta di negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur. Dorongan untuk menumbuhkan minat ini berasal dari meningkatnya perhatian atas gagasan generasi muda dalam kehidupan politik (Smith et al., 2008). Kebutuhan untuk menghidupkan kembali misi inti kewarganegaraan dari pendidikan tinggi (Harkavy, 2006) dan keharusan untuk mengembangkan warga negara yang kompeten untuk demokrasi baru (Deželan & A. Maksuti, 2014). Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan di universitas juga mendapat perhatian selama

dekade terakhir. Pada tahun 1998 ketika bangsa ini mengalami degradasi politik, perguruan tinggi terpanggil untuk berperan menyelamatkan negara dari krisis tersebut. Pendidikan kewarganegaraan telah diperkenalkan ke Perguruan tinggi sebagai cara untuk mengembangkan warga negara yang menghormati orang lain, menghormati aturan, bertanggung jawab secara sosial dan memahami tentang sistem pemerintahan yang demokratis (Subkomite, 2011, 21).

Dalam hubungan ini, para pakar berpendapat bahwa pendidikan dapat menjadi alat untuk mempertahankan tatanan sosial bagi penguasa yang berkuasa dengan menanamkan jenis pengetahuan, perilaku dan karakter yang sesuai (Frazer, 2008) serta dapat mencapai tujuan demokrasi dengan memungkinkan peserta didik dapat berpikir kritis. Berkenaan dengan Pendidikan tinggi, McCowan (2012) berpendapat bahwa universitas berada dalam posisi yang baik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan refleksi yang mendasar bagi warganegara yang demokratis, mengingat tradisi kebebasan akademik dan peran institusi ini dalam memelihara pemikiran independen. Hasil Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan demokrasi dan partisipasi warga negara dalam ruang publik (Lipset, 1959; Levine, 2006).

Dengan kata lain mata kuliah ini menawarkan pemahaman kontekstual tentang cara-cara di mana perguruan tinggi mengistimewakan pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada penyediaan kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan partisipatif bagi bangsa dan negara. Saya berpendapat bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mencerminkan kesinambungan ideologi nasional konservatif tetapi juga cara di mana pendidikan tinggi mengadaptasi ideologi semacam itu untuk kelangsungan hidup mereka sendiri dalam masyarakat. Di masa kemunduran demokrasi di belahan dunia lainnya, pemasalahan ini dan problematisasinya menjadi lebih penting untuk dibahas.

Melihat pentingnya pendidikan kewarganegaraan pada konteks bangsa dan negara di perguruan tinggi, maka harus dipersiapkan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa dari berbagai pendekatan model atau metode pembelajaran pada kesempatan ini saya menggunakan pendekatan *case method* atau metode kasus. Metode pembelajaran ini merupakan pendekatan yang berpusata pada mahasiswa, mahasiswa dijadikan sebagai aktor utama yang menganalisis masalah, menemukan masalah serta memberikan solusi terhadap kasus yang dianalisis.

Jamaludin (2021) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendekatan *case method* merupakan sebuah strategi yang berguna dapat membantu peserta didik berdiskusi bagaimana menganalisis, mengidentifikasi dan memperoleh solusi dari masalah-masalah kasus tersebut, serta dapat membandingkan keputusan-keputusan alternatif sampai pada kesimpulan.

Studi kasus pada penelitian ini menerapkan analisis masalah bersumber dari kasus yang saat ini sedang hangat diperbincangkan yang nanti akan dikontekstualkan pada materi yang sedang didiskusikan. Melalui pendekatan ini secara langsung membuka dan membangun literasi mahasiswa tentang konsep negara demokratis.

PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PEMBENTUKAN WARGANEGARA

Gagasan bahwa pendidikan pada tingkat universitas penting dalam mengembangkan warga negara yang aktif bukanlah hal baru. Penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pendidikan tinggi dalam keterlibatan masyarakat yang kritis di kalangan generasi muda (Levine 2006; Cole & Heinecke, 2015). Fokus pendidikan ilmu sosial pada perguruan tinggi di AS dalam menanamkan nilai-nilai dan budaya serta keterampilan diyakini dapat membantu mempersiapkan peserta didik dalam kehidupan demokratis (Scott, 2006). Demikian pula, Gutmann (1999) berpendapat bahwa pendidikan ilmu sosial yang baik yang berkomitmen pada berpikir kritis kemungkinan besar akan menumbuhkan banyak nilai keterampilan pada warga negara.

Pada salah satu negara di Asia Tenggara, Pendidikan tinggi memiliki tujuan yang berbeda. Pendirian universitas pertama pada tahun 1917 berfungsi untuk memasok pegawai negeri untuk pengaturan administrasi negara. Pendirian universitas-universitas besar lainnya pada dekade-dekade berikutnya juga menjawab kebutuhan akan tenaga-tenaga dengan keahlian khusus yang dapat mengisi jabatan-jabatan birokrasi di berbagai Kementerian dan departemen. Meskipun universitas ini kemudian menawarkan program studi di bidang lain, Watson (1980, 195) berpendapat bahwa lembaga perguruan tinggi adalah sekolah untuk mendidik mahasiswa menjadi profesional yang dipersiapkan masuk kedalam sistem pemerintahan dari pada lulusan sarjana menghasilkan luaran yang kritis dan demokratis.

Westheimer dan Kahne (2004) selanjutnya mengidentifikasi tiga orientasi warganegara yang pertama warganegara yang bertanggung jawab, kedua warganegara partisipatif dan yang ketiga warganegara berorientasi pada keadilan yang dihasilkan dari pendidikan demokrasi yang berbeda di AS. Meskipun perbedaan dibuat dalam tipologi antara pendidikan untuk warganegara yang bertanggung jawab dan warganegara partisipatif, pengkokohan mereka seputar komitmen warga negara terhadap komunitas politik melalui kesukarelaan dan partisipasi dalam isu-isu politik dan kewarganegaraan dalam negara republik. Akan tetapi, dua jenis warganegara yang diatas berbeda dari jenis yang ketiga, yaitu warga negara yang berorientasi pada keadilan dalam proses pendidikan yang menekankan pada proses pengajaran dan pembelajaran untuk memungkinkan peserta didik memahami dan menganalisis penyebab struktural masalah sosial dan menjadi agen perubahan pendidikan untuk warga negara seperti ini tampaknya sangat menggema dalam pendidikan demokrasi tidak hanya mempelajari pemikiran kritis tentang masalah kekuasaan dan keadilan tetapi juga keterlibatan dan kritis terhadap institusinya.

Dalam konteks Asia, para ahli berpendapat bahwa demokrasi yang diterapkan di negara barat berbeda dengan kontek asia demikian pula dengan Pendidikan kewarganegaraan. Lee (2004) mencatat Konsep kewarganegaraan dalam masyarakat Asia didasarkan pada moralitas, perkembangan kepribadian individu dan hubungan antara individu dan masyarakat. Dalam ranah politik hal ini diterjemahkan ke dalam definisi

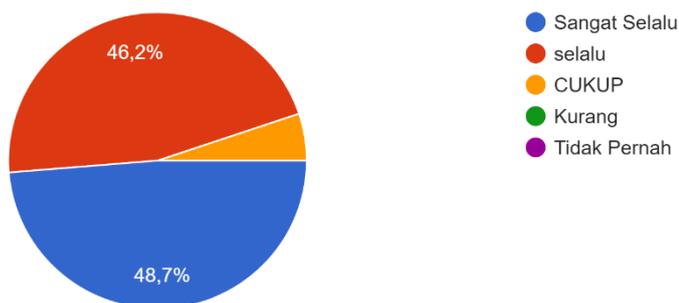
demokrasi yang luas dimana pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang demokratis (Lee 2004, 29). Oleh karena itu, kurikulum kewarganegaraan masa lampau di sejumlah negara Asia merupakan kombinasi pendidikan kewarganegaraan dan moral, dengan unsur-unsur kewarganegaraan ditempatkan di atas moral yang juga berarti kepentingan negara di atas pribadi (Lee, 2008). Akan tetapi, mengingat globalisasi ekonomi dan demokratisasi yang terjadi pada 1990-an, sejumlah negara Asia telah melakukan reformasi kurikulum dengan tujuan untuk mendorong warga negara yang lebih kreatif dan kritis yang dapat bersaing dalam sistem ekonomi global dan merangkul budaya yang lebih pluralistik (Kennedy 2008; Choo 2015) (Kennedy, 2008; Choo, 2015). Ada tren perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan menuju inklusi literasi politik dan pengetahuan universal dan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan, serta keterampilan partisipasi aktif dan pemikiran kritis (Doong, 2008; Mori & I. Davies, 2015; Hung, 2015). Namun demikian, penekanan pada nilai-nilai dan praktik kritis dan pluralistik antara lokal dan nasional dalam pendidikan kewarganegaraan tetap tidak merata di antara masyarakat Asia yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *expost facto*. Dimana penelitian *expost facto* dapat digunakan untuk tujuan deskriptif, eksploratori dan eksplanatori (Marmoah et al., 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan model *case method* melalui pemberian tugas analisis kasus-kasus yang berkembang pada saat ini dengan mengkontekstualkan pada materi yang sedang dibahas. Lokasi penelitian ini bertempat di salah satu Universitas di Karawang. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa FKIP. Sedangkan sample pada penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan IPS. Sedangkan Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes, observasi dan angket. Penggunaan tes dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana memahami materi ini. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan daftar *Checklist* dengan merekam semua aktifitas proses pembelajaran. Sedangkan angket digunakan untuk menjangkau data setelah proses pembelajaran berlangsung instrumen yang digunakan menggunakan skala *Likert* dengan beberapa butir pertanyaan. Dalam menyebarkan angket menggunakan google form melalui tautan WhatsApp grup kelas.

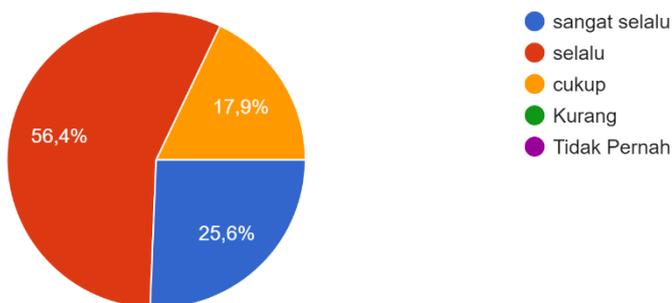
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan pertama mengenai upaya dalam membentuk warganegara yang bertanggung jawab. Diperoleh data 48,7% sangat selalu dan 46,2% selalu.



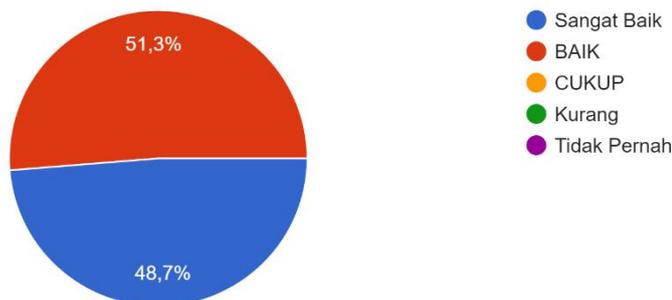
Gambar 1. Grafik pertanyaan tentang MK PKN dapat menumbuhkan warganegara yang bertanggung jawab

Kedua, mengenai pembelajaran yang diterapkan menumbuhkan warga negara partisipatif. Diperoleh data 56% menyatakan selalu.



Gambar 2. Grafik pertanyaan tentang pembelajaran yang diterapkan menumbuhkan warganegara partisipatif.

Ketiga, pertanyaan ini mengenai pembelajaran yang berlangsung mengajarkan rasa keadilan. Dari data yang diperoleh menyakan bahwa 51,3% baik.



Gambar 3. Grafik pertanyaan tentang pembelajaran yang berlangsung menunjukkan rasa keadilan.

Case Method merupakan salah satu dari metode pembelajaran dalam proses pendidikan yang dapat mengasah pengetahuan dalam pemecahan masalah dan keterampilan berargumen dan mencari solusi yang tepat (Sidebang, 2021). Dalam proses pembelajaran menggunakan case method mahasiswa diberikan suatu masalah yang harus didiskusikan Bersama teman dan mencari faktor masalah dan menghasilkan solusi serta

mereka membahasnya dalam forum diskusi kelas. Tujuan utama dari pembelajaran ini dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi warganegara partisipasi efektif dalam demokrasi (Cole, R. M., and W. F. Heinecke, 2015). Dari proses stimulus inilah diharapkan mahasiswa dapat berpikir kritis dari isu-isu yang sedang di diskusikan Widyaningrum (2016) Kreativitas berasal dari kegembiraan mencari pengalaman baru, menikmati tugas-tugas sulit, inisiatif sendiri, tekad, kecenderungan untuk mengkritik orang lain, keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan keyakinan, selalu ingin tahu, sensitif dan emosional, energik dan gigih. *multi-tasking*, percaya diri, rasa humor, rasa keindahan, berpikiran maju dan imajinatif.

Tantangan lain yang dihadapi pendidikan tinggi khususnya pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan para mahasiswa memasuki dunia pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya. Semakin nyata bahwa perguruan tinggi di mana-mana menyaksikan tekanan yang semakin besar untuk menghadapi tuntutan dunia pekerjaan (Boontinand, 2021). Selanjutnya Aronowitz (2000) berpendapat bahwa universitas semakin menjadi lumbung pengetahuan karena mereka lebih peduli dengan menghasilkan pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia untuk melayani kebutuhan sector ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi relevan ketika menyangkut hasil dari luaran lulusan menyangkut dalam hal moral dan etika lulusan yang baik serta kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, kualitas yang dihargai oleh pengguna lulusan. Akibatnya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang sesuai untuk pendidikan tinggi dipusatkan pada peningkatan karakter yang baik, tanggung jawab individu, dan pelayanan masyarakat yang mendorong inkuiri kritis atau memungkinkan menjadi warga negara yang terlibat secara politik dan berorientasi pada keadilan.

Tuntutan inilah yang harus dipersiapkan oleh guru dan dosen selama proses pembelajaran dalam meningkatkan generasi yang terdidik untuk berpartisipasi berdasarkan demokrasi yang berkeadilan. Membangun generasi terdidik membutuhkan proses yang panjang dan kondisi yang kondusif (Wirawati, 2017). Dengan motivasi literasi yang baik maka akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang kewarganegaraan.

Isu mengenai politisasi kehidupan berdemokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat Asia lebih mengutamakan nilai-nilai moral, belum menyentuh kedalam keharmonisan dan tanggung jawab sosial untuk mengembangkan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab (Doong 2008; Seyedali. et al. 2014). Selain itu juga di negara yang sudah dewasa seperti Inggris, Frazer (2008) mencatat bahwa pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada life skill bukan pada mengembangkan literasi politik, komunikasi dan keterampilan sosial. Maka dalam konteks Indonesia Pendidikan demokrasi menurut permendiknas memiliki makna (a) persatuan dan kesatuan bangsa, menyiratkan harmoni dalam pluralistik, serta cinta lingkungan, bangga sebagai warga negara Indonesia, sumpah pemuda, kejaya negara persatuan republik Indonesia, ikut serta

bela negara, sikap positif terhadap negara republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan (b) norma, peraturan perundang-undangan, termasuk tata kehidupan keluarga, peraturan sekolah, norma yang ada dalam masyarakat, peraturan daerah, norma kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan hukum internasional; (c) HAM, termasuk hak dan tanggung jawab anak, hak dan tanggung jawab anggota masyarakat, instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia; d) Kebutuhan warga negara, meliputi gotong royong, harga diri sebagai warga negara, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap pengambilan keputusan kolektif, penentuan nasib sendiri, persamaan hak bagi warga negara; e) Konstitusi Negara, termasuk Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama, Konstitusi yang digunakan di Indonesia, hubungan dasar antara Negara dan Konstitusi yang digunakan di Indonesia, Negara dan Konstitusi; (f) kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan negara, otonomi pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi versus masyarakat sipil, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokratis; (g) Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka; Dan h) Globalisasi, meliputi globalisasi dalam lingkungannya, kebijakan luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan evaluasi globalisasi (Sutisna, 2017). keberagaman pendapat ini menunjukkan perlunya adanya diskusi dan musyawarah antara pemikir akademis dengan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia dilihat dari berapa faktor yang terjadi, menyangkut implementasi kurikulum pendidikan kewarganegara dalam lingkungan pendidikan tinggi.

KESIMPULAN

Masyarakat terutama di kalangan mahasiswa sangat diharapkan ikut serta aktif dalam kehidupan berdemokrasi, literasi yang dibangun untuk merangsang keaktifan mahasiswa harus didukung dengan proses pembelajaran yang beragam salah satunya dengan pendekatan study kasus, rekayasa proses pembelajaran ini akan menambah literasi Mahasiswa dalam berkehidupan berdemokrasi yang sesuai dengan pokok bahasan. Karena ada tuntutan yang membayangi mereka sebagai warganegara, sebagai mana yang telah dipaparkan dalam pembahasan, pertama tuntunan mahasiswa masuk dalam lingkungan pekerjaan, tuntunan ini bukan hanya mendorong mahasiswa memiliki keterampilan sesuai dengan keilmuannya tetapi juga mendorong mahasiswa dibekali moral dan etika lulusan yang baik serta kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, kedua membangun warganegara dalam konteks ini adalah mahasiswa yang kritis dan bertanggung jawab serta ikut serta berpartisipasi mengembangkan literasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronowitz, S. (2000). *The Knowledge Factory: Dismantling the Corporate University and Creating True Higher Learning*. Beacon Press.
- Boontinand, V. (2021). Educating for citizenship in a fragile democracy: interrogating civic agenda in Thai higher education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 53(3), 1–17.
- Choo, S. S. (2015). Citizenship Education in Asia. *Asia Pacific Journal of Education*, 35(2), 149–152. <https://doi.org/10.1080/02188791.2015.1048764>
- Cole, R. M., & Heinecke, W. F. (2015). The Civic Classroom in Higher Education: Contested Terrain. *Citizenship Teaching and Learning*, 10(2), 185–202. https://doi.org/10.1386/ctl.10.2.185_1
- Deželan, T., & A. Maksuti. (2014). *The Relevance of Higher Education in Slovenia for Creating Virtuous Citizens and a Working Democracy: An Underexploited Source?* Palgrave Macmillan.
- Doong, S. (2008). *Taiwan's New Citizenship Curriculum: Changes and Challenges*. Comparative Education Research Centre.
- Frazer, E. (2008). *Key Perspectives, Traditions and Disciplines: Overview*. SAGE.
- Gutmann, A. (1999). *Democratic Education*. Princeton University Press.
- Harkavy, I. (2006). The Role of Universities in Advancing Citizenship and Social Justice in the 21st Century. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1(1), 5–37. [10.1177/1746197906060711](https://doi.org/10.1177/1746197906060711)
- Hung, C.-Y. (2015). Tradition Meets Pluralism: The Receding Confucian Values in the Taiwanese Citizenship Curriculum. *Asia Pacific Journal of Education*, 35(2), 176–190. [10.1080/02188791.2014.934782](https://doi.org/10.1080/02188791.2014.934782)
- Jamaludin, J., & Alanur, S. N. (2021). Pengembangan Civic Knowledge dan Literasi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Case Method Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 28–36.
- Kennedy, K. J. (2008). *Globalised Economies and Liberalised Curriculum: New Challenges for National Citizenship Education*. Comparative Education Research Centre.
- Lee, W. O. (2004). *Emerging Concepts of Citizenship in Ithe Asian Context*. Comparative Education Research Centre.
- Lee, W. O. (2008). *Tensions and Contensions in Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific*. Comparative Education Research Centre.
- Levine, P. (2006). *Fact Sheet Higher Education and Civic Engagement: Summary*. School of Public Policy, University of Maryland.
- Lipset, S. M. (1959). Some Social Requisites for Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 53, 69–105. [10.2307/1951731](https://doi.org/10.2307/1951731)
- Marmoah, S., Poerwanti, J. I., Sutami, J. I., & Kentingan, J. (2022). *Manajemen Pembelajaran Berbasis Studi Kasus (Case Method)*.
- McCowan, T. (2012). Opening Spaces for Citizenship in Higher Education: Three Initiatives in English Universities. *Studies in Higher Education*, 37(1), 51–67. [10.1080/03075079.2010.493934](https://doi.org/10.1080/03075079.2010.493934)
- Mori, C., & I. Davies. (2015). Citizenship Education in Civics Textbooks in the Japanese

- Junior High School Curriculum. *Asia Pacific Journal of Education*, 35(2), 153–175. 10.1080/02188791.2014.959468
- Scott, J. C. (2006). The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations. *Journal of Higher Education*, 77(1), 1–39. <https://doi.org/10.1353/jhe.2006.0007>
- Sidebang, R. (2021). Pengaruh Disiplin Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar pada Siswa Kelas iii SD Negeri 040528 Sukadame T.P. *ESJ (Elementary School Journal)*, 11(1), 15–22.
- Smith, G., R. O., E. Jubb, E. Sperling, & M. W. (2008). Teaching Citizenship in Higher Education. *European Political Science*, 7(2), 135–143. <https://doi.org/10.1057/eps.2008.8>
- Subcommittee of the Education Policy Reform on Civic Education. (2011). *Strategy for the Development of Education for Citizenship Education 2010-2018*. Office of the Education Council. (in Thai).
- Sutisna, A. (2017). Peningkatan literasi politik pemilih pemula melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 1(1).
- Watson, K. (1980). *Educational Development in Thailand*. Heinemann Asia.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What Kind of Citizen? the Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Widyaningrum, H. (2016). Pentingnya Strategi Pembelajaran Inovatif dalam Menghadapi Kreativitas Siswa di Masa Depan. *Proceedings International Seminar FoE (Faculty of Education)*, 268–277.
- Wirawati, D. (2017). Gerakan Literasi Mahasiswa Melalui Kuliah Membaca Kritis dan Kreatif: Sebuah Pengalaman Nyata. *PIBSI XXXIX*.